

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan bahwa informasi yang dikeluarkan perusahaan sangat penting karena mempengaruhi keputusan investasi dari pihak luar perusahaan. Sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya suatu informasi tentang kinerja pihak manajemen perusahaan agar keinginan pemilik dapat direalisasikan. Laporan tahunan bisa menjadi sumber informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bisa sebagai pemberi sinyal kepada investor, informasi pada laporan tahunan biasanya berisi kondisi keuangan maupun non-keuangan perusahaan (Nopiyanti dan Darmayanti, 2016).

Pengungkapan kinerja keuangan yang tercermin dari harga saham pada pihak di luar perusahaan yang ditampilkan sebagai informasi adalah suatu cara bagi perusahaan untuk memberikan penilaian dari pihak luar kepada perusahaan itu sendiri. Pengungkapan informasi tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi kinerja keuangan yang tercantum pada laporan keuangan, berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka akan mencerminkan kekayaan investor yang semakin besar dan prospek perusahaan kedepan dinilai semakin menjanjikan. Pertumbuhan prospek tersebut oleh investor akan ditangkap sebagai sinyal positif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor yang tercermin dari meningkatnya harga saham perusahaan.

Teori signal menjelaskan bagaimana suatu perusahaan memberikan dorongan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan

dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor) (Prapaska, 2012). Manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran pada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi laporan keuangan tahunan yang dilakukan perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan perkembangan harga saham perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena mengandung banyak catatan, rincian dan gambaran keadaan masa lalu, saat ini dan tentu saja masa yang akan datang untuk memperkirakan pertumbuhan perusahaan.

Fenandar (2012) menyatakan bahwa pengeluaran investasi merupakan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Pengeluaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan memberikan sinyal kepada investor dan kreditor bahwa perusahaan akan tumbuh di masa mendatang. Biasanya pengeluaran investasi yang dilakukan oleh manajer telah memperhitungkan besarnya pengembalian yang akan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.1 Stakeholder Theory

Teori stakeholders merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholders. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat pada stakeholdersnya. Dengan demikian, suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh dukungan yang berasal dari stakeholders. Menurut Hadi (2011), stakeholders adalah semua pihak, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori stakeholder berkaitan dengan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Hal ini sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Membantu manajemen perusahaan mengerti lingkungan stakeholders mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efisien diantara keberadaan hubungan hubungan lingkungan perusahaan mereka merupakan tujuan utama dari teori stakeholders. Akan tetapi tujuan yang lebih luas stakeholders adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam memaksimalkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholders. Diharapkan melalui stakeholders theory pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

2.2 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat Nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Harga saham yang semakin tinggi akan meningkatkan Nilai Perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilikperusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing*), dan manajemen asset (Pratiwi, 2017).

Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar. perusahaan karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan Nilai perusahaan (Cintia, 2014).

Memaksimalkan nilai perusahaan (firm value) saat ini disepakati sebagai tujuan dari setiap perusahaan, terutama yang berorientasi laba. Nilai saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Nilai perusahaan diyakini tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan saat ini tetapi juga menggambarkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Rahayu (2010), beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan adalah nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku dan nilai likuidasi .

- Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- Nilai pasar adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham .Nilai pasar merupakan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan yang dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat .
- Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan.

- Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aktiva dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.
- Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi.
- Nilai sisa merupakan bagian para pemegang saham. Suharli dalam Martalina (2011) menyatakan bahwa nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham.
- Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi .

2.2.1 Pengukuran Nilai Perusahaan

Pamungkas (2012) mengemukakan bahwa nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Nilai perusahaan tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, antara lain dengan menggunakan:

a) Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio merupakan rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. *Price Earning Ratio* merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi investasi prospektif. *Price Earning Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Laba per Lembar Saham}}$$

b) Market Book Ratio

Market book ratio adalah perbandingan antara nilai buku per lembar saham dengan nilai pasar saham. Nilai buku per lembar saham adalah nilai kekayaan bersih ekonomis dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kekayaan bersih ekonomis adalah selisih total aktiva dengan total kewajiban.

$$\text{Market to book ratio} = \frac{\text{nilai pasar ekuitas per lembar}}{\text{nilai buku ekuitas perlembar}}$$

c) Tobin's Q ratio (Q Tobin)

Tobin's Q dihitung dengan rasio nilai pasar saham perusahaan ditambah dengan hutang lalu membandingkan dengan total aset perusahaan (Bhekti ,2013) .

Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu :

$$\text{Tobin's Q} = \frac{EMV + D}{EBV + D}$$

Dimana:

EMV = Nilai pasar ekuitas (jumlah saham yang beredar x *closing price*)

D = Nilai buku dari total hutang

EBV = Nilai buku dari total Asset (selisih dari total asset dan kewajiban)

d) Market Value of Equity

Market Value of Equity yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan menurut penilaian para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah (saham beredar) dikali dengan harga per lembar ekuitas.

MVE = Volume Saham x Harga Saham Penutupan

e) ***Enterprise Value***

Enterprise value yaitu nilai kapitalisasi market yang dihitung sebagai nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah *minority interest* dan saham preferen dikurangi total kas dan ekuivalen kas.

$$EV = \text{Kapitalisasi pasar} + \text{Hutang Bank} - \text{Kas \& Setara Kas}$$

f) ***Price Book Value (PBV)***

PBV merupakan hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku. Nilai buku per lembar saham dapat dihitung dengan jumlah saham beredar (Maryati Rahayu, Bida Sari, 2018). Dengan membagi harga per lembar saham dengan nilai buku akan diperoleh rasio nilai pasar/ nilai buku sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}}$$

2.3 Good Corporate Governance

Menurut Kaihatu (2015) *good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak para pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *takeholder*. Pada dasarnya, penerapan *corporate governance* bertujuan untuk mengoptimumkan tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* (Wardoyo,Theodora , 2013).

2.3.1 Prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance (GCG)*

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b) *Kemandirian (Independency)* , yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c) *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- d) Pertanggung jawaban (*responsibility*) , yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan.

2.3.2 Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Faktor Eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sector publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.3.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip corporate governance yang diterapkan memberikan manfaat diantaranya yaitu:

- a) Meminimalkan agency costs dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi prinsipal dengan agen.
- b) Meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
- c) Meningkatkan citra perusahaan.
- d) Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang rendah.
- e) Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholder terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

2.3.4 Mekanisme Good Corporate Governance

Menurut Kaihatu (2015) *good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* yang ada. Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Dalam penulisan ini, mekanisme GCG diprosikan dengan 5 (lima) variabel antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi.

Struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme Corporate Governance perusahaan. Struktur Corporate Governance berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS / pemegang saham). Dan pemangku kepentingan yang lainnya, serta aturanaturan maupun prosedur kebijakan pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan

1. Kepemilikan Manajerial

Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan (Dwi Sukirni 2012). Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Yulius dan Josua, 2007). Keputusan bisnis yang diambil

manajer adalah keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham.

Menurut Wahidah Wati (2002),Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direksi dan Komisaris). Kepemilika manajerial bisa diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan *Good Corporat Governance*, karena berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* dengan prinsipprinsip yang sudah ada . Kepemilikan manajemen, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2013).

$$\text{Kepemilikan Manajemen} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajer}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2005). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Menurut Tarjo (2008) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor pasif dan investor aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan (Etty Murwaningsar, 2009). Menurut Frysa (2011), aktivitas *monitoring* institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. *Monitoring* yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain, sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. Kepemilikan institusional, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi (Wardoyo, 2013), sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} : \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Frysa, 2011).

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku atau sesuai dengan kode etik usaha. Kode etik usaha merupakan kebijakan perusahaan bahwa seluruh karyawan dan direksi harus berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi dengan demikian melayani kepentingan terbaik

perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas yang menjadi bagiannya. Hal tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairness* (Tri dan Fery, 2012) .

Ukuran Dewan Direksi = \sum Anggota Dewan Direksi

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Yusuf dkk, 2017). Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan perusahaan, memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Frysa, 2011). Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya

tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti, 2004).

5. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Suriani Ginting, 2016). Menurut Yusuf dkk (2017) Komisaris Independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dengan adanya komisaris independen, maka akan dapat mengurangi konflik agensi dalam perusahaan sehingga dapat lebih berfokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Wulandari (2015) menganggap komisaris yang independen sama dengan direktur non-eksekutif. Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan pemegang saham. *Non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

$$\text{Dewan Komisaris Independent} : \frac{\sum \text{dewan komisaris independent}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100 \%$$

6. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Yusuf dkk, 2017). Menurut Astria (2011) struktur organisasi perusahaan adalah konsep yang dibuat guna meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi berkala terhadap kinerja perusahaan dan menjamin akuntabilitas kerja manajemen. Struktur organisasi perusahaan diharuskan memiliki komite audit yang dapat membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab.

Siallagan dan Machfoedz (2013) menyatakan bahwa pihak investor, analis dan regulator menganggap jika komite audit mampu memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya.

Komite audit juga berperan aktif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas. Dalam hal ini, komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
- Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Terdaftar yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Terdaftar yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Terdaftar, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Terdaftar yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Terdaftar, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan terdaftar dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

Komite Audit : \sum Anggota Komite Audit

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada diperusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Suharli, 2006).

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki control yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu

perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumberdaya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Yunita, 2011).

Ferry dan Jones (dalam Rumondor, 2015), mengatakan ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya. Selain itu ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari *total assets* yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Ukuran perusahaan dikalkulasi dengan menggunakan nilai absolut total asset. Rumusnya:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pedoman pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis Dan Judul Penelitian	Variable dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber dan Tempat Penelitian
1	Wardoyo , Theodora Martina Veronica (2013). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibili ty & Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan	Variable Y Nilai perusahaan dan Variable X Dewan direksi ,GCG,Komisaris ,CSR,ROA ,ROE Metode: Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi melalui jurnal-jurnal, buku-buku, dan media informasi lainnya	Good Corporate Governance yang diukur dengan variabel ukuran dewan direksi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel Good Corporate Governance lainnya, yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan	Tempat:Seluruh perusahaan perbankan yang ada di Indonesia pada tahun 2010 . Sumber : Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 4, No. 2, 2013, pp: 132-149
2	Agus Santoso (2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening	Variabel intervening dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan sbagai variable independen (Y) Variable X: Good Corporate Governance DanKepemilikan institusional Metode: Penelitian ini merupakan penelitian jenis	Hasil persamaan regresi pertama menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham institusional memiliki koefisien positif. Hal ini berarti peningkatan kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hasil dari persamaan 2 digunakan untuk menjawab hipotesis 2 yaitu <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap	Tempat : perusahaan manufaktur sektor logam, kimia, dan kemasan plastik yang listed di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 – 2016 Sumber: <i>Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS</i>

		<p>kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan yang didapatkan di laman website bursa efek indonesia www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor logam, kimia, dan kemasan plastik yang listed di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.</p>	<p>2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 67-77) ISBN : 978-6025617-01-0</p>
3	<p>Yustisia Puspaningrum (2017) pengaruh corporate social responsibility dan Kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan Dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan Sebagai</p>	<p>Y: Nilai Perusahaan X1: CSR X2: Kepemilikan Manajerial Z1: Profitabilitas Z2: Ukuran Perusahaan</p> <p>Metode: penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kausal – komparatif. Sampel penelitian ini adalah laporan</p>	<p>(1) CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan di BEI, (2) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan di BEI, (3) Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan di BEI, (4) Profitabilitas sebagai variabel moderating tidak memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan</p>	<p>Tempat: Perusahaan pertambangan di BEI</p> <p>Sumber: Jurnal Profita ,Edisi 2 Tahun 2017</p>

	variabel moderating (studi empiris pada perusahaan pertambangan di bursa Efek indonesia)	keuangan perusahaan pertambangan tahun 2011 dan 2012 dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis Linear Berganda	pertambangan di BEI, (5) Ukuran perusahaan sebagai variabel moderating memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan di BEI, (6) Ukuran perusahaan sebagai variabel moderating memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan pertambangan di BEI.	
4	Ryan Anugrah Pratiwi (2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan <i>Food And Beverage</i> Yang <i>Listing</i> Di Bursa Efek Indonesia	Variable Y: Nilai Perusahaan X1: Good Corporate Governance X2: Ukuran Perusahaan Metode : Analisis Regresi Linear Berganda data sekunder maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi.	variabel GCG secara parsial (masing - masing) berpengaruh terhadap nilai perusahaan variabel ukuran perusahaan secara parsial (masing - masing) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan variabel GCG dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan	Tempat : perusahaan-perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang <i>Listing</i> di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 Sumber: Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017
5	Tri Kartika Pertiwi . Ferry Madi Ika Pratama (2012) Pengaruh Kinerja Keuangan, <i>Good</i>	Variable Y: Nilai Perusahaan X1: Kinerja Keuangan X2: GOOD Corporate Governance (kepemilikan manajerial)	Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> (kepemilikan manajerial) bukanlah	Tempat: perusahaan makanan dan minuman yang memenuhi kriteria pengambilan sampel pada tahun 2008

	<i>Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage</i>	Metode: Menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder	variabel yang memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.	hingga 2010 Sumber: JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.14, NO. 2, SEPTEMBER 2012: 118-127
--	---	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang dimaksudkan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* berupa kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit terhadap nilai perusahaan yang diproksi oleh Tobin's Q dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi .

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Sugiyono (2013). Berdasarkan hubungan antara landasan teori, refensi dari penelitian terdahulu, rumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa makin besar proporsi kepemilikan manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri. Jadi

peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan internal perusahaan dan pemegang saham dan mengarah kearah yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan nilai yang lebih tinggi. Namun, ketika ekuitas yang dimiliki oleh manajemen perusahaan mencapai tingkat yang terlalu tinggi, peningkatan lebih lanjut dari kepemilikan manajerial dapat memberikan saham yang cukup bagi manajer perusahaan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan terjadinya penurunan nilai perusahaan (Wenjuan, 2011).

Untuk itu diperlukan cara pengendalian yang dapat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Sofyaningsih, 2011). Ketika kepemilikan manajerial mendekati tingkat yang cukup tinggi, masalah keagenan hanya dapat diredakan secara luas jika ada keselarasan penuh antara kepentingan manajer dan pemegang saham. Pada penelitian Sally 2017, menghasilkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan .

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan .

Tarjo (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2015).

Menurut Tarjo (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian Agus Santoso (2017), bahwa *Good Governance* yang diwakili oleh *proxy* kepemilikan institusional memiliki pengaruh langsung yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham institusional terfokus pada laba sekarang, jika laba sekarang dirasa menguntungkan maka investor tidak akan menarik investasinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.6.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan

Jumlah dewan direksi suatu perusahaan disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut karena berarti pengelolaan yang dilakukan oleh dewan direksi semakin baik maka kinerja perusahaan nya akan meningkat. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Keberadaan dewan direksi tersebut juga dianggap meningkatkan pelayanan perusahaan dan menunjukkan tata kelola yang baik telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang di atur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal tersebut

berarti semakin besar jumlah dewan direksi maka semakin besar pula kemungkinan strategi perusahaan akan tercapai dan hal tersebut tentunya akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan calon investor . Hal ini sejalan dengan penelitian Wardoyo, 2013 bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan ,yang ditetapkan dalam jumlah satuan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Diduga Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan .

2.6.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris Independen merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif. Dewan komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan, akan dipandang lebih baik karena pihak dari luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif di banding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan.

Dewan Komisaris Independen turut mengawasi dan memberikan pengarahan tentang kebijakan Direksi dan hal umum yang berkaitan dengan perusahaan dan kegiatan usahanya, serta memberikan nasihat kepada Direksi jika diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris Independen bertindak sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan Dewan Komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi yang positif dari porsi dan independensi dari Dewan Komisaris Independen eksternal. Dewan komisaris Independen juga

bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan (Tri & Fery, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016), menunjukkan bahwa dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya pengaruh positif tersebut disebabkan oleh mekanisme control yang kuat dari komisaris independen terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan peran vital bagi terciptanya GCG.

Semakin banyak dewan komisaris independen maka mekanisme dalam memonitoring manajemen akan semakin baik, tentunya kepercayaan para pemegang saham juga akan semakin tinggi kepada perusahaan . Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Diduga Dewan Komisaris Independent berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan .

2.6.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan .

Siallagan dan Machfoedz (2013) menyatakan bahwa pihak investor, analis dan regulator menganggap jika komite audit mampu memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap selalu memperhatikan unsur efektivitas dalam proses dalam pengambilan keputusan sehingga memberikan kontribusi dalam nilai perusahaan.

H₅ : Diduga Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan .

2.6.6 Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderating pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Secara Parsial.

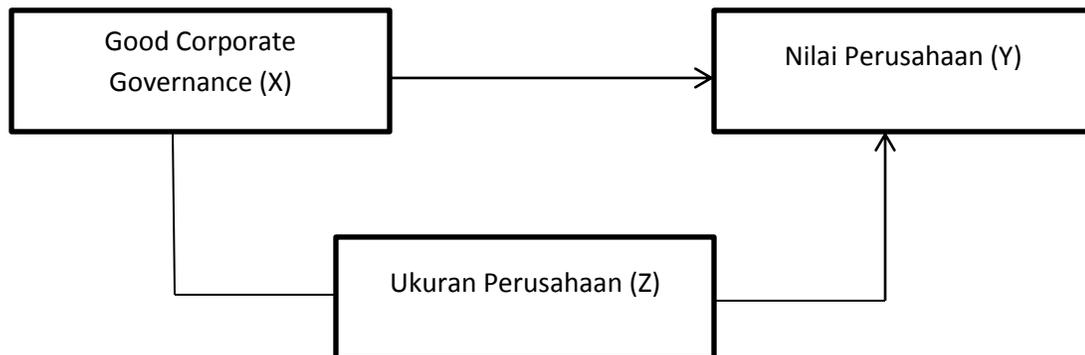
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan dari besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Sehingga dengan ukuran perusahaan yang besar dapat mempengaruhi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam memaksimalkan asset . Perusahaan harus memperkuat faktor internal dan eksternal agar dapat tetap berkembang dan bertahan . Salah satu faktor internal nya melakukan pembenahan dalam manajemen dan meningkatkan evektivitas efisiensi kerja atau melaksanakan ekspansi usaha dalam rangka mengoptimalkan pangsa pasar yang berpotensi guna mencapai nilai perusahaan yang tinggi (Tri & Fery, 2012).

Perusahaan dengan asset yang semakin lama semakin besar memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap para pemegang sahamnya namun juga dengan *stakeholder* yang lain sperti masyarakat sekitar dan pemerintah, sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk

menerapkan struktur corporate governance yang baik agar pendanaan dari pihak eksternal tetap stabil (Puspaningrum, 2017). Dengan semakin besar ukuran perusahaan maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Diduga Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderating pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independent dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahan Secara Parsial .

2.7 Kerangka Teori

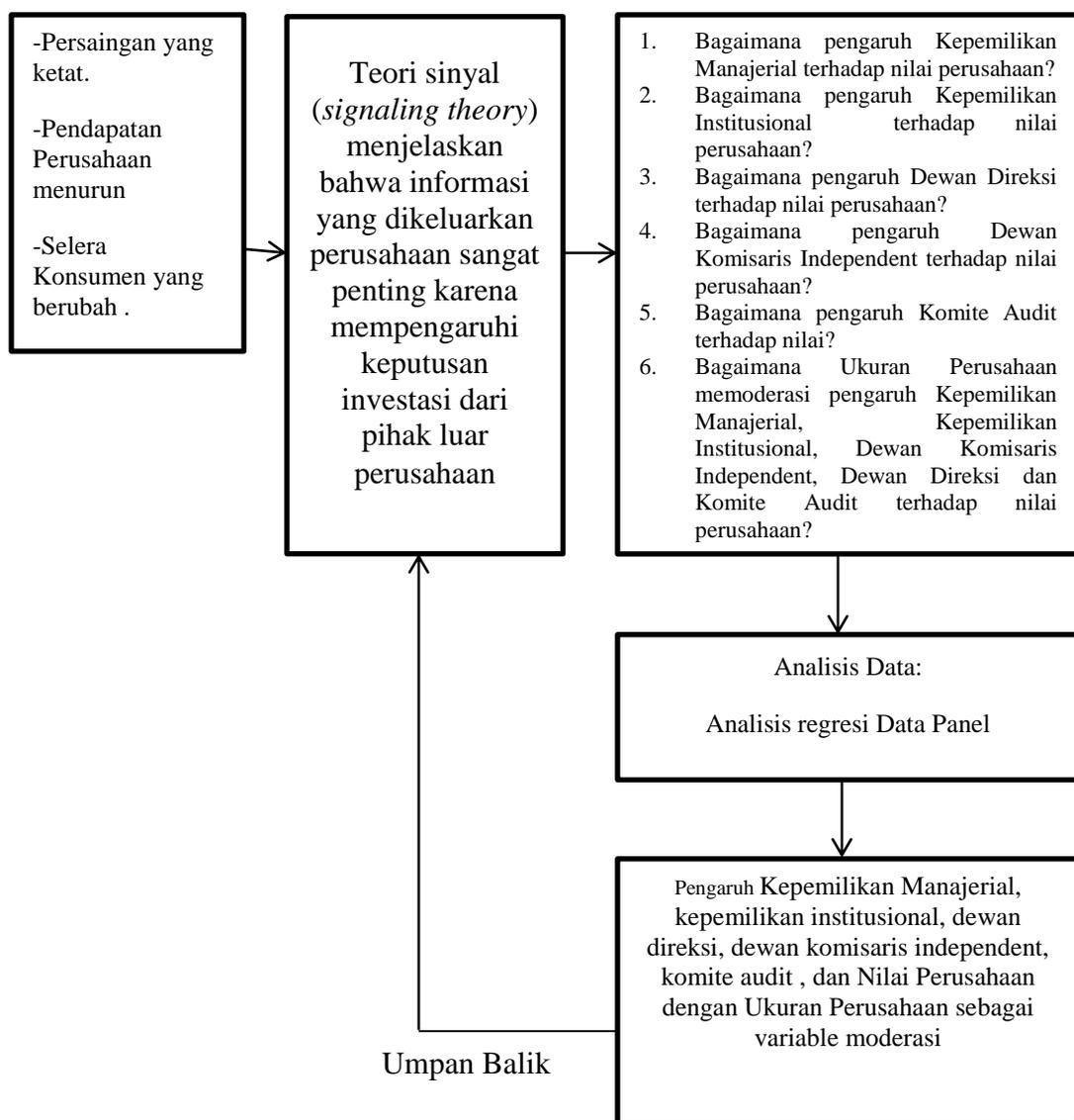


Gambar 2.2 Kerangka Teori

2.8 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah di jelaskan di atas ,dapat dibuat kerangka pikir tentang hubungan antara Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi adalah :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang didapat belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan uraian kerangka teori, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H₂ : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H₃ : Diduga Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H₄ : Diduga Dewan Komisaris Independent berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H₅ : Diduga Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H₆ : Diduga Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderating pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independent dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Secara Parsial.